PT. BPR MANGUN PUNDIYASA

LAPORAN TATA KELOLA
(GCG)

PT BPR MANGUN PUNDIYASA
DESEMBER 2021

Bandung, 26 April 2022

Nomor : 182 /Dir/BPR-MP/IV/2022
Hal : **Laporan Tata Kelola BPR - Posisi 31 Desember 2021**
Lampiran : 1 (satu) Set

Yth. Kepala Kantor Regional 2 Jawa Barat
Otoritas Jasa Keuangan
Jl. Ir. Djuanda No. 152 - BANDUNG 40135
Cq. Satuan Kerja Bidang Pengawasan BPR

Email : KR2-JABAR@OJK.GO.ID ; cep_s@ojk.go.id

Dengan hormat ,
Memenuhi pelaporan OJK ,dengan latar belakang meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemantauan penerapan tata kelola BPR sejalan dengan diimplementasikannya POJK No. 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan BPR/BPRS melalui Sistem Pelaporan OJK (APOLO) serta mendukung aksesibilitas data/informasi BPR dalam rangka pengawasan. Dengan payung hukum sbb :

1. POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang penerapan Tata Kelola bagi BPR,
2. SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang penerapan Tata Kelola bagi BPR,
3. SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang perubahan atas SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang penerapan Tata Kelola bagi BPR.

maka bersama surat ini kami sampaikan Laporan Tata Kelola BPR Mangun Pundiyasa sebagai berikut :

- Laporan Penerapan Tata kelola beserta Laporan Self Assesment dan kesimpulan Self Assesment tahun 2021,
- Bukti pengiriman ke asosiasi BPR yaitu DPP PERBARINDO dan media keuangan Media BPR melalui www.perbarindo.org.
- Bukti laporan tata kelola 2021 diunggah di laman https:// www.bprmangunpundiyasa.co.id (sesuai Pasal 76(1)(2)POJK Tata Kelola)
- Bukti Email ke Komisaris Utama PT. BPR Mangun Pundiyasa.
- Bukti kirim pelaporan melalui Aplikasi Apolo.

Demikian agar diterima dengan baik. Atas segala perhatian dan tanggapannya kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR MANGUN PUNDIYASA

(Sriyanti)
Direktur Utama

Tembusan:
1. Yth.DPP PERBARINDO dan Media BPR : softcopy ke www.perbarindo.org
2. Yth. Komisaris Utama BPR Mangun Pundiyasa.
3. Website www.bprmangunpundiyasa.co.id

TEMBUSAN

Bandung, 26 April 2022

Nomor : 182/Dir/BPR-MP/IV/2022
Hal : **Laporan Tata Kelola BPR - Posisi 31 Desember 2021**
Lampiran : 1 (satu) Set

Yth. Kepala Kantor Regional 2 Jawa Barat
Otoritas Jasa Keuangan
Jl. Ir. Djuanda No. 152 - BANDUNG 40135
Cq. Satuan Kerja Bidang Pengawasan BPR

Email : KR2-JABAR@OJK.GO.ID ; cep_s@ojk.go.id

Dengan hormat ,
Memenuhi pelaporan OJK ,dengan latar belakang meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemantauan penerapan tata kelola BPR sejalan dengan diimplementasikannya POJK No. 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporn BPR/BPRS melalui Sistem Pelaporan OJK (APOLO) serta mendukung aksesibilitas data/informasi BPR dalam rangka pengawasan. Dengan payung hukum sbb :
1. POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang penerapan Tata Kelola bagi BPR,
2. SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang penerapan Tata Kelola bagi BPR, 3. SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang perubahan atas SEOJK Nomor
5/SEOJK.03/2016 tentang penerapan Tata Kelola bagi BPR.

maka bersama surat ini kami sampaikan Laporan Tata Kelola BPR Mangun Pundiyasa sebagai berikut :

- Laporan Penerapan Tata Kelola beserta Laporan Self Assesment dan kesimpulan Self Assesment tahun 2021,
- Bukti pengiriman ke asosiasi BPR yaitu DPP PERBARINDO dan media keuangan Media BPR melalui www.perbarindo.org.
- Bukti Laporan Tata Kelola 2021 diunggah di laman https:// www.bprmangunpundiyasa.co.id (sesuai Pasal 76(1)(2)POJK Tata Kelola)
- Bukti Email ke Komisaris Utama PT. BPR Mangun Pundiyasa.
- Bukti kirim pelaporan melalui Aplikasi Apolo.

Demikian agar diterima dengan baik. Atas segala perhatian dan tanggapannya kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR MANGUN PUNDIYASA



(Sriyanti)
Direktur Utama

Tembusan:

1. Yth.DPP PERBARINDO dan Media BPR : softcopy ke www.perbarindo.org
2. Yth. Komisaris Utama BPR Mangun Pundiyasa.
3. Website www.bprmangunpundiyasa.co.id

Perbarindo

Dari: Perbarindo (noreply@perbarindo.org)
Kepada: pt_bpr_mangunpundiyasa@yahoo.co.id
Tanggal: Senin, 9 Mei 2022 20.56 WIB

PERBARINDO
DEWAN PENGURUS PUSAT
PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN

TANDA TERIMA

No.5373/GCG/DPP-PERBARINDO/IV/2022

Kepada Yth,
PT BPR MANGUN PUNDIYASA
Jl. Ahmad Yani No. 221 + 223 Kav. E-15 Bandung

KETERANGAN
Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2021 dari PT BPR MANGUN PUNDIYASA dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas pengiriman Laporan Tata Kelola (GCG) BPR /BPRS yang di kirim melalui sistem SIP PERBARINDO

Jakarta, 30 April 2022

PERBARINDO

MediaBPR
Fokus Memberdayakan Usaha Mikro, Kecil & Menengah

TANDA TERIMA

No.5373/GCG/Media-BPR/IV/2022

Kepada Yth,
PT BPR MANGUN PUNDIYASA
Jl. Ahmad Yani No. 221 + 223 Kav. E-15 Bandung

KETERANGAN
Majalah MediaBPR-Perbarindo, telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2021 dari PT BPR MANGUN PUNDIYASA dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas pengiriman Laporan Tata Kelola (GCG) BPR /BPRS yang di kirim melalui sistem SIP PERBARINDO

Jakarta, 30 April 2022

MediaBPR-PERBARINDO

SIP Tata Kelola BPR Mangun Pun
Not secure | https://bprmangunpundiyasa.co.id/2022/04/30/sip-tata-kelola-bpr-mangun-pundiyasa-2021/

SIP Tata Kelola BPR Mangun Pundiyasa 2021

April 30, 2022April 30, 2022 bprmangu OJK



Search ...

Recent Posts

- SIP Tata Kelola BPR Mangun Pundiyasa 2021
- Program KEJAR
- Publikasi Penanganan Pengaduan
- Alur Pengaduan Nasabah

BPR Mangun Pundiyasa - Tata Kelola 2021

Dari: Bpr mangun Pundiyasa (pt_bpr_mangunpundiyasa@yahoo.co.id)

Kepada: simangunsong.imanuella@yahoo.com

Tanggal: Sabtu, 30 April 2022 12.02 WIB

SIP_TATA KELOLA 2021_BPR MANGUN PUNDIYASA.pdf
521.4kB

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT. BPR Mangun Pundiyasa

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

495957-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-601343-30042022085528

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

bprmangun@bprmangunpundiyasa.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-30 08:55:28

Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

LAPORAN TATA KELOLA
(GCG)
PT BPR MANGUN PUNDIYASA
DESEMBER 2021

LAPORAN POKOK-POKOK PELAKSANAAN TUGAS DIREKTUR KEPATUHAN 2021

PT BPR MANGUN PUNDIYASA
JALAN AHMAD YANI
Kota Bandung
Jawa Barat

LAPORAN POKOK-POKOK PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN
PT BPR MANGUN PUNDIYASA
TAHUN 2021

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa keungan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi kepatuhan Bank Perkreditan Rakyat , Berdasarkan Surat Edaran Otoritas jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapann tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK Nomor 24/SE OJK.03/2020 yaitu Perubahan atas SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR. maka PT. BPR Mangun Pundiyasa menyampaikan laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana yang diatur pada pasal 70 dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir bulan laporan sebagaimana yang diatur pada pasal 71.

A. INFORMASI UMUM

1) STRUKTUR ORGANISASI

1.1. Susunan Direksi:

Dalam salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor Kep-9/KR.02/2019 yang ditetapkan tanggal 15 Januari 2019, kemudian diadakan RUPS pemegang saham PT BPR MANGUN PUNDIYAS pada tanggal 05-April 2019 dan dibuatkan Akta Notaris nomor 19 tanggal 30 April 2019, Notaris Hilda Sophia Wiradiredja, SH, MH, dan Akta Notaril terbaru yaitu Akta Nomor 10 Tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuatkan oleh Notaris Liana Dewi Sijoatmodjo, SH ,susunan Direksi PT BPR MANGUN PUNDIYASA adalah sbb:

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Sriyanti	Direktur Utama	05 /04/2019- 05/04/ 2024
2.	Tatang Sumanta	Direktur	05/11/2021 – 05/11/2026

10

1.2. Dewan Komisaris:

Dalam salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor Kep/-113/KR.02/2018 yang ditetapkan tanggal 12-04-2018, kemudian diadakan RUPS pemegang saham PT BPR MANGUN PUNDIYASA pada tanggal 18-05-2018 dan dibuatkan Akta Notaris nomor 16tanggal 12-06-2018, Notaris Hilda Sophia Wiradiredja, SH, MH, susunan Dewan Komisaris PT. BPR MANGUN PUNDIYASA adalah sbb:

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Imanuella Simangunsung	Komisaris Utama	12/04/2018-12 /04/2023

1.3. Pejabat Eksekutif

Berdasarkan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pasal 13 ayat (1)b, PT. BPR MANGUN PUNDIYASA telah menunjuk pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Internal, fungsi Kepatuhan dan fungsi Manajemen RIsiko. Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan
1.	Hari Haryono	Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern	14/06/2019
2.	Junita Afiatni R.	Pejabat Eksekutif: ▪ Fungsi Kepatuhan ▪ Fungsi Manajemen Risiko ▪ Penanggung Jawab Penerapan APU & PPT	04/09/2019
3.	Junita Afiatni R.	Kabag Operasional	20/01/2020

2) FORMASI SUMBER DAYA MANUSIA

Formasi sumber daya manusia per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

2.1. Direksi

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Lama pada Jabatan ini
1	Sriyanti	Direktur Utama	S2	4 tahun
2	Tatang Sumanta	Direktur	D3	2 bulan

2.2. Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Lama Masa Jabatan
1	Imanuella Simangunsung	Komisaris Utama	S1	4 tahun

2.3. Pejabat Eksekutif

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Lama Masa Jabatan
1.	Hari Haryono	PE Audit Intern	D3	4 tahun
2.	Junita Afiatni R.	Pejabat Eksekutif: o Fungsi Kepatuhan o Fungsi Manajemen Risiko o Penanggung Jawab Penerapan APU & PPT	S1	2 Tahun
3.	Junita Afiatni R.	Kabag Operasional	S1	2 tahun

3) KETENTUAN INTERN

3.1 Ketentuan Perkreditan

No	Nama Ketentuan	Nomor SK	Tanggal SK	Tanggal berlaku
1	Keputusan Kredit	02/SKP/DIR/BPR-MP/I/2018	12 Jan 2018	22 Jan2018
2	Produk Penyaluran Kredit Pegawai Negeri Sipil (PNS)	167/SK-DIR/BPR-MP/IV/19	01 April 2019	01 April 2019
3	Produk Penyaluran Kredit tanpa Agunan	168/SK/DIR/BPR-MP/IV/19	01 April 2019	01 April 2019
4	Produk Kredit Kendaraan Bermotor	170/SK/DIR/BPR-MP/IV/19	01 April 2019	01 April 2019
5	Produk Kredit Jaminan Sertifikat	187/ SK/DIR/BPR-MP/IV/19	01 April 2019	01 April 2019
6	Produk Kredit Kendaraan Motor Baru	194/ SK/DIR/BPR-MP/IV/19	20 April 2019	20 April 2019
7	Restrukturisasi Kredit Terkait Dampak Corona Virus Dease 19 (Covid -19)	234/ SK/DIR/BPR-MP/IV/20	30 Maret 20	30 Maret 2020

No	Nama Ketentuan	Memorandum Direksi	Tanggal Memo	Tanggal berlaku
1	Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK)	295/DIR/BPR-MP/V/18	31 Mei 2018	31 Mei 2018
2	Penambahan Fasilitas Kredit dan Sisa Tunjangan Daerah (TKD) Pemkot	009/ DIR/BPR-MP/I/19	01 Jan 2019	01 Jan 2019
3	Pemisahan Produk KTA	010/ DIR/BPR-MP/I/19	07 Jan 2019	07 Jan 2019
4	Produk Kredit Pegawai Negeri Sipil (PNS) jabatan Struktural	136/ DIR/BPR-MP/IV/19	01 April 2019	01 April 2019
5	Produk Kredit Kendaraan Bermotor	193/M-DIR/BPR/MP/IV/2017	05 April 2019	05 April 2019
6	Perubahan Produk Kredit Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk jabatan Fungsional	169B / DIR/BPR/MP/IV/2019	05 April 2019	05 April 2019
7	Perubahan Produk Kredit Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk jabatan Struktural	169A/ DIR/BPR/MP/IV/2019	05 April 2019	05 April 2019
8	Produk Kredit Jaminan Sertifikat	199/DIR/BPRMP/IV/2019	10 April 2019	10 April 2019
9	Perubahan Suku Bunga	222/DIR/BPR-MP/V/2019	13 Mei 2019	13 Mei 2019

	Kredit untuk PNS Fungsional Sertifikasi Guru			
10	Perubahan Penambahan Fasilitas kredit dengan Sisa Tunjangan PNS	232/ DIR/BPR-MP/V/2019	25 April 2019	25 April 2019
11	Produk Kredit Pembelian Motor baru	202/M-DIR/BPRMP/V/2019	30 April 2019	30 April 2019
12	Perubahan Suku Bunga Kredit SHM	531/DIR/BPR-MP/IX/2019	06 September 2019	06 September 2019
13	Ketentuan Top Up Kredit Diperpanjang Kembali	532/ DIR/BPR-MP/IX/2019	06 September 2019	06 September 2019
14	Persetujuan Restrukturisasi Kredit	661/DIR/BPR-MP/X/19	29 Oktober 2019	29 Okt 2019
15	Produk Kredit Usaha Kecil (KUK) Uangku	777/DIR/BPRMP/XII/19	01 Desember 2019	01 Des 2019
16	Perubahan system untuk Sciem Kredit PNS per Triwulan	294/DIR/BPR-MP/V/20	01 April 2020	01 April 2020
17	Perubahan Sciem Kredit Kendaraan	720A/DIR/BPR-MP/XI/2020	01 November 2020	01 Nov 2020
18	Perubahan Kredit Kendaraan Bermotor	459/DIR/BPR-MP/III/2021	13 Maret 2021	13 Maret 2021

3.2 Ketentuan Operasional

No	Nama Ketentuan	Nomor SK	Tanggal SK	Tanggal berlaku
1	Kewenangan Limitasi Sistem	001A/SK/DIR/BPR-MP/I/2019	01 Januari 2019	01 Januari 2019
2	Pemegang sandi dan kunci brankas jaminan	213/SK/DIR/BPR-MP/IV/19	09 Mei 2019	09 Mei 2019
3	Pemegang sandi dan kunci brankas jaminan	549/SK/DIR/BPR-MP/IX/19	13 September 2019	13 Sept 2019
4	Batas wewenang otorisasi Kepala Oprasional	641/SK/DIR/BPR-MP/X/19	20 Oktober 2019	20 Oktober 2019
5	Pelaksanaan Biaya Entertaiment	099 B/SK/DIR/BPR-MP/II/20	10 Februari 2020	10 Februari 2020
6	Pemberian Bingkisan dan Hadiah kepada pihak ke tiga	099A/SK/DIR/BPR-MP/II/20	10 Februari 2020	10 Februari 2020

7	Informasi Debitur dengan pelaporan SLIK	188/SK/DIR/BPR-MP/III/20	12 Maret 2020	12 Maret 2020
8	Tentang Suku Bunga Simpanan Pihak Ke Tiga	0787/SK/DIR/BPR-MP/XI/2020	25 November 2020	25 November 2020
9	Kenaikan BPJS Ketenagakerjaan	035/DIR/BPR-MP/I/2021	19 Januari 2021	19 Januari 2021
10	Kenaikan BPJS Kesehatan	036/DIR/BPR-MP/I/2021	19 Januari 2021	19 Januari 2021

No	Nama Ketentuan	Memorandum Direksi	Tanggal Memo	Tanggal berlaku
1	Penggunaan Slip Setoran	046/DIR/BPR-MP/I/19	30 Januari 2019	30 Januari 2019
2	Pemberian Insentif Aplikasi Kredit untuk Oprasional	507/DIR/BPR-MP/IX/2019	3 September 2019	3 September 2019
3	Pemberian Insentif Admin Descall	513/DIR/BPR-MP/IX/2019	3 September 2019	3 September 2019
4	Pemberian Insentif Kepala Oprasioanal	514/DIR/BPR-MP/IX/2019	3September 2019	3 September 2019
5	Pemberian Insentif Account Officer (AO)	515/DIR/BPR-MP/IX/2019	4 September 2019	4 September 2019
6	Pemberian Insentif Bisnis Manajer	517/DIR/BPR-MI/IX/2019	4 September 2019	4 September 2019
7	Biaya kas kecil untuk bulan bersangkutan	535/DIR/BPR-MP/IX/19	9 September 2019	9 September 2019
8	Perubahan Biaya Service kendaraan untuk team bisnis	765A/DIR/BPR-MP/XII/19	01 Desember 2019	01 Desember 2019
9	Pengikatan Jaminan	809/BPR-MPXII/2019	23 Desember 2019	23 Desember 2019
10	Ketentuan Penetapan Standar Penggajian Karyawan	066/DIR/BPR-MP/I/20	1 Januari 2020	1 Januari 2020
11	Refund Asuransi Debitur sebelum jatuh tempo	064A/DIR/BPR-MP/I/2020	28 Januari 2020	28 Januari 2020
12	Fasilitas Pinjaman Karyawan	082A/DIR/BPR-MP/II/2020	01 Februari 2020	01 Februari 2020
13	Fasiltas Pinjaman Karyawan	082B/DIR/BPR-MP/II/2020	01 Februari 2020	01 Februari 2020
14	Aturan Biaya Administrasi kredit KUK	102/DIR/BPR-MP/II/2020	12 Februari 2020	12 Februari 2020
15	Insentif Kendaraan	720B/DIR/BPR-MP/XI/2020	01 Nopember 2020	01 Nopember 2020

3.3 Ketentuan Tata Kelola

No	Nama Ketentuan	Nomor SK	Tgl SK	Tanggal berlaku
1	Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)		18-06-2020	18-06-2020

3.4 Ketentuan Kepegawaian

No	Nama Ketentuan	Nomor SK	Tanggal SK	Tanggal berlaku
1	Pengangkatan Pejabat Eksekutif yang membawahi Kredit	095/SK-DIR/BPR-MP/III/19	10 Maret 2019	10 Maret 2019
2	Pengankatan Satuan Pengawas Intern	337/SK-DIR/BPR-MP/VI/19	28 Juni 2019	28 Juni 2019
3	Surat Penunjukan Akunting untuk melakukan tugas membuka Antar Bank Aktiva (ABA)	437A/DIR/BPR-MP/VIII/19	01 Agustus 2019	01 Agustus 2019
4	Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi	439/DIR/BPR-MP/VIII/19	03 Agustus 2019	03 Agustus 2019
5	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komisaris	448/DIR/BPR-MP/VIII/19	03 Agustus 2019	03 Agustus 2019
6	Surat Penunjukan Administrasi Oprasional Untuk melakukan tugas Pemegangan Kartu ATM	475B/DIR/BPR-MP/VII/19	16 Agustus 2019	16 Agustus 2019
7	Pengangkatan PE Manajemen Resiko, Kepatuhan dan APU PPT	516/SK/DIR/BPR-MP/IX/19	04 September 2019	04 September 2019
	Pengesahan Peraturan Perusahaan	188.3/PP.5852-Disnaker	11 September 2019	11 September 2019
8	Pengankatan Pejabat Eksekutif (PE) Kepala Operasional	049/SK/DIR/BPR-MP/I/20	20 Januari 2020	20 Januari 2020
9	Jam Oprasional Kantor dan Penjadualan Kerja	205/SK-DIR/BPR MP/IV/2020	06 April 2020	06 April 2020

3.5 Ketentuan Manajemen Resiko

No	Nama Ketentuan	Nomor SK	Tgl SK	Tanggal berlaku
1	Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko	428/DIR/BPR-MP/VII/19	29 Juni 2019	29 Juni 2019

B. PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN

1) PELAKSANAAN SOSIALISASI & PELATIHAN

Selama tahun 2021 telah melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain sbb:

No	Materi	Trainee	Ex/In
1	Sosialisasi Ketentuan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	Junita Robby	21/01/2021
2	Sosialisasi Ketentuan BPR/BPRS POJK No.62/POJK.03/2020	Sriyanti Imanuella Tatang S.	24/02/2021
3	Pembelian Buku Direksi (Menguasai Fungsi Kepatuhan dan	Sriyanti	01/03/2021
	Manajemen Perbankan		
4	Sosialisasi Implementasi Pedoman Iklan Jasa Keuangan dan	Sriyanti	10/03/2021
	Perjanjian Baku Sektor Jasa Keuangan bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan	Imanuella	
5	Pembahasan Program Literasi dan Edukasi Keuangan 2021	Junita	10/03/2021
6	Penerapan Strategi Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)	Sriyanti	08/04/2021
7	Kepatuhan dan Pelaporan_Penerapan Tata Kelola	Sriyanti Imanuella	26/04/2021
8	Tausiyah Bulan Ramadhan - grand tebu	All Staf	04/05/2021
9	Sosialisasi Intern Kantor - APU PPT dll	All Staf	24/05/2021
10	Pengenalan Tipologi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorismme	Anggun	10/06/2021
11	Sosialisasi Penyidikan Tindak Pidana Perbankan	Sriyanti Imanuella Tatang S. Junita , Anggun	16/06/2021
12	Menyeimbangkan Cash Flow dan Benefit karyawan di masa	Junita	17/06/2021
	Pandemi		
13	Sosialisasi Terkait Penerapan OJK BOX (OBOX) - patch 1	Sriyanti Imanuella	24/06/2021
14	Pelatihan terkait Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal bagi PJK	Anggun	24/06/2021

15	Sosialisasi Terkait Penerapan OJK BOX (OBOX) - patch 2	Robby	01/07/2021
16	Pengenalan Tipologi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Patch -2	Anggun	01/07/2021
17	Kegiatan Coaching Clinic Sistem Apliaksi Portal Perlindungan Konsumen (APPK)	Robby	01/07/2021
18	Sosialisasi Program JKN KIS	-	13/07/2021
19	Bank Performance Tingkat Kesehatan BPR dan risiko risiko yang terjadi di BPR	All	28/07/2021
20	Penanganan antisipasi Covid 19 untuk karyawan	All	30/07/2021
21	Pengaturan Perlindungan Data Pribadi sebagai Penyeimbang Pesatnya Perkembangan Teknologi Digital di sektor Jasa Keu.	Kementrian Kom dan Informatika	20/08/2021
21_1	1. Ikhtisar Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi 2.POJK No.62/POJK.03/2020 tentang BPR 3. POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas POJK POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stumulus perekonomian 4. POJK No.2/POJK.03/2021 tentang perubahan atas POJK No.34 POJK.03/2020 tentang kebijakan bagi BPR sebagai dampak penyebaran corona virus	Sriyanti Imanuella Tatang Sumanta	23/08/2021
22	Pengajian BPR Mangun Pundiyasa	All	27/08/2021
23	Sewa Lap. Badminton karyawan - 17 Agustus	All	31/08/2021
24	Penguatan SDM BPR melalui pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Kerja	Sriyanti Junita	02/09/2021

25	Pelatihan Sertifiaksi Jarak Jauh - Direktur Sriyanti level - 2 + anti gen	Sriyanti	03/09/2021
26	Agenda Sosialisasi - Ketentuan BPR _SE OJK No. 18/SEOJK.03/2021 perubahan atas SE OJK No. 8/SEOJK.03/2019 tentang Lapbul BPR	sriyanti ,Hari, Junita, Aneli Disa	03/09/2021
27	Sosialisasi Ketentuan dan Aplikasi Pelaporan Online OJK Apolo - LBBPR	Sriyanti , Robby Junita, Anelli	20/09/2021
	Enhancement APOLO POJK 62/POJK.03/2020 - 18122020	Disa	
28	Sosialisasi Struktur Data dan Aplikasi OJK - BOX (OBOX) BPR	Robby	27/09/2021
28_2	Pelatihan Penerapan Program APU PPT sebagai Pencegahan Tindak APUPPT yang berasal dari Tindak Pidana Kehutanan dan Tindak Pidana Lingkungan Hidup	CS	18/10/2021
28_3	Launching OBOX	Sriyanti Imanuella	02/11/2021
29	Pelatihan Penyusunan RBB 2022 sesi 1	Sriyanti	12/11/2021
30	Pelatihan Penyusunan RBB 2022 sesi 2	Sriyanti	25/11/2021
31	Pelatihan OBOX	Robby	25/11/2021
32_3	Sosialisasi Ketentuan dan APOLO_Modul Laporan RBB		27/11/2021
32_2	Launching Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia	Sriyanti , Imanuella	30/11/2021
32	Pelatihan IT - Vendor USSI (1)	All	30/11/2021
33	Peran Intenal Audit OJK	Hari	03/12/2021
34	Training - Kantor Akuntan Publik (KAP)	Direksi	03/12/2021
35	Sosialisasi Diseminasi SRA TPPU TPPT - LJK	Anggun , Restu	06/12/2021
36	Sosialisasi Capacity Buuilding +anti Gen Syarat Traiing OJK -	Sriyanti Tatang	08/12/2021

37	Seminar Nasional Virtual Perbarindo - Outlook	Sriyanti	09/12/2021
38	Sosialisasi Program Kerja Inisiatif Strategis 3 A - Digitalisasi	Sriyanti	09/12/2021
39	Pelatihan IT - Vendor USSI (2)	All	09/12/2021
40	Strategi Anti Fraud dan Refreshment Ketentuan Tata Kelola BPR	Sriyanti	15/12/2021
41	Sosialisasi Ketentuan dan Aplikasi Pelaporan Online OJK	Sriyanti, Robby	16/12/2021
	APOLO modul pelaporan Profil	Junita, Anelli	
42	Enhacment SLIK	Robby Junita	17/12/2021
43	Edukasi Pengelolaan dan Keaslian Uang Rupiah	Tania	20/12/2021
44	Training RBB - 30 /11/2021	Sriyanti Anelli , Sopyan Tatang Sumanta	20/12/2021

2) PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Realisasi penerapan fungsi kepatuhan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Pemenuhan Struktur Organisasi

Telah diangkat Direktur atas nama Tatang Sumanta sebagai pemenuhan Struktur Organisasi atas dasar kelulusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan surat OJK Nomor SR 17/KR.0221/2021 Tanggal 16-09-2021 , Keputusan Dewn Komisioner OJK Nomor KEP-138/KR.02/2021 Tanggal 16-09-2021 , dan telah dinotarilkan dengan Nomor Akta Nomor 10 Tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat oleh Notaris Liana Dewi Sijoatmodjo. SH.

b. Penyimpangan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Pada tahun 2021 tidak ditemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksanaan Komitmen Terhadap Otoritas

Pelaksanaan komitmen terhadap Otoritas lain ditahun 2021 adalah sebagai berikut

No	Otoritas	Hal	Realisasi
1	KPP Pajak	Permintaan Penjelasan atas data/keterangan 1. Selisih Biaya Sewa Gedung periode 2016. 2. Indikasi adanya Laba yang kurang dilaporkan periode tahun 2016	Surat BPR Mangun Pundiyas No. 948/DIR/BPR-MP/XII/2021

Bandung, 30 April 2022
Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
PT BPR MANGUN PUNDIYASA

Sriyanti

PT BPR MANGUN PUNDIYASA

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2021

PT BPR MANGUN PUNDIYASA
JL. A YANI
BANDUNG
JAWA BARAT

BAB I
PENJELASAN UMUM

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, maka penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 2015, yang mewajibkan BPR menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Transparansi,
- Akuntabilitas,
- Pertanggungjawaban,
- Independensi, dan
- Kewajaran.

Manajemen PT BPR MANGUN PUNDIYASA berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola.

Penyampaian transparansi penerapan Tata Kelola BPR yang merupakan salah satu cakupan dari laporan penerapan Tata Kelola BPR dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 POJK Tata Kelola BPR.

Laporan penerapan tata kelola di PT BPR MANGUN PUNDIYASA tahun 2021 disusun mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

BAB II
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	Nama : Sriyanti
	NIK *) :
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, antara lain: 1) Membawahkan fungsi kepatuhan,fungsi manajemen risiko dan apu-ppt 2) Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko. 3) Menempatkan dana pada bank lain; 4) Menerima penempatan dana dari bank lain; 5) Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga non bank atas persetujuan Dewan Komisaris. c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. e. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai. f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan. g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. h. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
2	Nama : Tatang Sumanta
	NIK *) :
	Jabatan : Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab : a. Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan operasional BPR. b. Menghimpun Dana dan Menyalurkan Dana c. Memastikan dan meningkatkan tata-tertib dan disiplin kerja. d. Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris: 1) 2)	

**) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.*

***) Termasuk tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris yang belum dilaporkan dalam laporan penerapan Tata Kelola tahun sebelumnya.*

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	Nama : Imanuella Simangunsong
	NIK *) :
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggungjawab : a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. d. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
2	Nama : -
	NIK *) :
	Jabatan : Komisaris
	Tugas dan Tanggung jawab :
	a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. d. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. e. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan agenda rapat Dewan Komisaris. f. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.
Rekomendasi kepada Direksi: 1) - 2) -	

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab: -
2	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab: -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab: -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	NIK*)	Keahlian**)	Komite ***)			Pihak Independen (Ya/Tidak)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunesasi & Nominasi	
	-						

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
**) Diisi dengan kompetensi dan/atau pengalaman masing-masing anggota komite sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Komite.
***) Diisi dengan: ketua, anggota, atau tidak menjabat.

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Program Kerja : -
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
2	Komite Pemantau Risiko
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Program Kerja : -
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :

*) Jumlah program kerja yang dilaporkan sama dengan Realisasi program kerja.

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

*) NIK dan sandi bank lain hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank perkreditan rakyat.

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Hubungan Keuangan **)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Sriyanti		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Tatang Sumanta		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Nama – Hubungan Keuangan". Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh "Bapak A – Pinjaman".

- Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Tidak Ada".

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Sriyanti		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Tatang Sumanta		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Nama – Hubungan Keuangan". Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh "Bapak A – Pinjaman".

- Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Tidak Ada".

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Imanuella Simangunsong		Rp. 457.000.000	15,23%
2	-			

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

*) NIK dan sandi bank lain hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank perkreditan rakyat.

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Hubungan Keuangan **)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Imanuella Simangunsong	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	-	-	-	-	-

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Nama – Hubungan Keuangan". Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh "Bapak A – Pinjaman".

- Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Tidak Ada".

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Imanuella Simangunsong		Tidak ada	Tidak ada	Paul Rospita Simanjuntak (Ibu kandung), Wesly Simangunsong (Bapak Kandung)
2	-				

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Nama – Hubungan Keuangan". Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh "Bapak A – Pinjaman".

- Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Tidak Ada".

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji *)	2 orang		1 orang	
2	Tunjangan jabatan	2 orang		1 orang	
3	Tantiem				
4	Kompensasi berbasis saham	-		-	
5	Remunerasi lainnya	2 orang		1 orang	
Total					

*) Gaji merupakan gaji pokok, tidak termasuk tunjangan yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris serta keluarga.

**) Remunerasi lainnya bagi pengurus BPR dan ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	-	-
2	Transportasi	1 unit kendaraan roda empat	Sewa 1 Unit Kendaraan roda empat
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan-	-
4	Fasilitas Lainnya *)	-	-

*) Fasilitas lainnya dapat dirinci dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing BPR, misalnya fasilitas komunikasi.

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan *)	Perbandingan (a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	: 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	: 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	: 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	: 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	: 1

*) Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	10-02-2021	4 orang	RBB : - Kredit - Simpanan - PPAP - Kredit Pencairan
2	22 juni 2021	3 Orang	Bisnis : - Strategi - Team Leader - Target AO
3	06 Agustus 2021	5 orang	Bisnis : - Target penjualan - Penyelesaian Kredit Bermasalah Operasional : - Laporan Profil Risiko
4	13 Agustus 2021	6 orang	Bisnis : - Pencapaian Team Leader - Restrukturisasi - Kelengkapan Dokumen
5	04 Nov 2021	10 orang	Pembahasan Memorandum Interen : - Ketentuan Target - Insentif AO dan TL untuk kredit KTA

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran **) (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Imanuella Simangunsong		100 %	-	100 %
2	-				

5 JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Total Fraud	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah Diselesaikan		nihil		nihil		nihil		nihil
Dalam proses penyelesaian**)	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya***)	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		nihil		nihil		nihil		nihil

*) BPR harus menjelaskan lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian penyimpangan internal oleh BPR. Dalam hal terdapat penyimpangan internal yang belum diupayakan penyelesaiannya, dapat dijelaskan upaya penelitian yang telah dilakukan.

**) Termasuk penyimpangan internal yang belum diselesaikan sebelumnya sampai dengan tahun laporan.

***) Merupakan penyimpangan internal yang masih dalam proses penelitian.

6 JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	**Jumlah (Satuan)**	
	Perdata	**Pidana**
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	nihil	nihil
Dalam proses penyelesaian	nihil	nihil
Total	nihil	nihil

7 TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rupiah)	Keterangan
-	-	-	-	-	-

(ini digunakan posisi laporan tahun 2021)

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan**)
	Nama	Jabatan	NIK*)	Nama	Jabatan	NIK*)			
	-								

(ini digunakan posisi laporan tahun 2021 dan seterusnya)

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Keterangan diisi dengan:

- Kesesuaian dan/atau ketidaksesuaian transaksi dengan ketentuan intern; dan
- Menjelaskan keterkaitan antara pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan pengambil keputusan.

8 PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
-	-	-	-	-	-

9 HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)

Terlampir

10 KESIMPULAN UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

Terlampir

PT. BPR Mangun Pundiyasa
Bandung, 30 April 2022

Sriyanti
Direktur Utama

Imanuella Simangunsong
Komisaris Utama

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT BPR MANGUN PUNDIYASA

Posisi : DESEMBER 2021

Modal Inti : Rp. 7. 009.617.516

Total Aset : Rp. 21.306.424.073

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment)* Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	**Peringkat Komposit**
2.18	Baik
Analisis	
BPR Mangun Pundiyasa masih ada kekosongan pengurus Komisaris 1 (satu) Orang.	

Bandung, 30 April 2022

Sriyanti
Direktur Utama

Imanuella Simangunsong
Komisaris Utama

Rekap Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Sebelum Ketentuan Manajemen Risiko Berlaku Secara Efektif

No	Faktor Penilaian	Penilaian (rata-rata)			Penilaian (dikalikan bobot)				Bobot BPR	Total Penilaian
		S	P	H	S(50)	P(40)	H(10)	Jumlah	B	
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1,00	1,75	2,00	0,50	0,70	0,20	1,40	20,00%	0,31
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	1,78	2,00	2,00	0,89	0,80	0,20	1,89	15,00%	0,32
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
4	Penanganan benturan kepentingan	2,00	2,00	2,00	1,00	0,80	0,20	2,00	10,00%	0,22
5	Penerapan fungsi kepatuhan	2,40	3,00	2,33	1,20	1,20	0,23	2,63	10,00%	0,29
6	Penerapan fungsi audit intern	2,60	2,50	2,00	1,30	1,00	0,20	2,50	10,00%	0,28
7	Penerapan fungsi audit ekstern	1,00	1,00	2,00	0,50	0,40	0,20	1,10	2,50%	0,03
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern				-	-	-	-	0,00%	-
9	Batas maksimum pemberian kredit	3,00	2,50	2,50	1,50	1,00	0,25	2,75	7,50%	0,23
10	Rencana bisnis	1,67	2,00	2,00	0,84	0,80	0,20	1,84	7,50%	0,15
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta pelaporan intenal	3,00	1,50	1,00	1,50	0,60	0,10	2,20	7,50%	0,18
	Nilai Komposit									2,01
	Peringkat Komposit								Baik	

Rekap Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Sesudah Ketentuan Manajemen Risiko Berlaku Secara Efektif

No	Faktor Penilaian	Penilaian (rata-rata)			Penilaian (dikalikan bobot)				Bobot BPR	Total Penilaian
		S	P	H	S(50)	P(40)	H(10)	Jumlah	B	
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1,00	1,75	2,00	0,50	0,70	0,20	1,40	20,00%	0,28
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	1,78	2,00	2,00	0,89	0,80	0,20	1,89	15,00%	0,28
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
4	Penanganan benturan kepentingan	2,00	2,00	2,00	1,00	0,80	0,20	2,00	10,00%	0,20
5	Penerapan fungsi kepatuhan	2,40	3,00	2,33	1,20	1,20	0,23	2,63	10,00%	0,26
6	Penerapan fungsi audit intern	2,60	2,50	2,00	1,30	1,00	0,20	2,50	10,00%	0,25
7	Penerapan fungsi audit ekstern	1,00	1,00	2,00	0,50	0,40	0,20	1,10	2,50%	0,03
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	2,33	2,00	2,00	1,17	0,80	0,20	2,17	10,00%	0,22
9	Batas maksimum pemberian kredit	3,00	2,50	2,50	1,50	1,00	0,25	2,75	7,50%	0,21
10	Rencana bisnis	1,67	2,00	2,00	0,84	0,80	0,20	1,84	7,50%	0,14
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta pelaporan intenal	3,00	1,50	1,00	1,50	0,60	0,10	2,20	7,50%	0,17
	Nilai Komposit									2,04
	Peringkat Komposit								Baik	

TABEL PREDIKAT KOMPOSIT

Nilai Komposit	Predikat Komposit
1.0 ≤ Nilai Komposit < 1.8	Sangat Baik
1.8 ≤ Nilai komposit < 2.6	Baik
2.6 ≤ Nilai Komposit < 3.4	Cukup Baik
3.4 ≤ Nilai Komposit < 4.2	Kurang Baik
4.2 ≤ Nilai Komposit ≤ 5	Tidak Baik